

HUBUNGAN PATRON-KLIEN DI LINGKUNGAN PERKEBUNAN TEMBAKAU VORSTENLANDEN KLATEN JAWA TENGAH: Perspektif Sosiologis tentang Ketahanan Nasional

Patron-Client Relationship in Vorstenlands Tobacco Plantation in Klaten Residency, Central Java: Sociological Perspective on National Resilience

Y. Sarworo Soeprapto¹, Nasikun², dan Purwanto²

Program Studi Ketahanan Nasional

Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This research tries to examine and describe the patron-client relationship in the society around Vorstenlanden tobacco plantation in Klaten reGENCY, Central Java. The main issues are examined here as follow: 1) the mode of patron-client relationship since the Dutch colonization until nowadays; 2) the impact of ongoing strong patron-client relationship to the live condition and welfare of peasants and workers; 3) examine to some extent the relationship between patron-client relationship and exploitation over peasants and workers; 4) why do peasants and workers not feel to be exploited both by tobacco plantation company and cooperation system among the tobacco peasants.

The research indicates that the patronage practise still exists among the people around the tobacco plantation company since its presence in the past until nowadays. The present patron-client relationship has strong ties with a patronage practise in the past. The patron is the plantation company supported by the local government (as state representation). And the client is peasant and worker. The patronage practise also developed on sub-communities. In the plantation company, the function hierarchy indicated the patron-client relationship. The workers are client of the staff officers acting as the patron. While in the field the peasants are a client of the mandor (supervisor) who acting as a patron. And finally, the peasants are also their clients who claim themselves as a peasant representation, such as a village government apparatus or a peasant organization.

1. *Harian Umum "Kedaulatan Rakyat" Yogyakarta.*

2. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

The patronage practise which still presents in the society around tobacco plantation has caused exploitation over workers and peasants until nowadays. This exploitation is not realized because it is done systematically and is preserved the unequally relationship between the plantation company and the peasants and between the plantation company and the worker (in the company) and peasants in the field.

Keywords: *Patron-client relationship, Vorstenlands tobacco plantation*

INGANTAR

tar Belakang

Perkebunan tembakau Vorstenlanden di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sejak awal keberadaannya sudah diwarnai oleh praktik patronase yang kental. Hubungan patron-klien di lingkungan masyarakat perkebunan tembakau untuk keperluan cerutu tersebut tak dapat dilepaskan dengan praktik patronase yang berkembang di masyarakat tempat perkebunan tembakau Vorstenlanden berada. Berbeda dengan perkebunan jenis lain yang pada umumnya berlokasi di luar pemukiman penduduk yang sudah ada dan membentuk pemukiman baru jauh dari kota, mirip daerah *frontier* atau perbatasan (Sartono Kartodirdjo dan Soekoto Suryo, 1994: 143-144), perkebunan tembakau Vorstenlanden di Klaten menyatu dengan masyarakat. Tanah yang dijadikan areal perkebunan adalah tanah penduduk. Kecuali para pejabat perusahaan perkebunan, tenaga kerja yang bekerja di perkebunan, baik di lahan maupun di pabrik, juga penduduk sekitar. Keberadaan pabrik, di Kebonagung, Gayamsari dan Wedi-Birit, juga di tengah-tengah atau berdekatan dengan pemukiman penduduk. Dengan demikian kultur dan struktur sosial masyarakat ikut mewarnai kultur dan struktur sosial yang ada di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden.

Sejarah perkebunan tembakau Vorstenlanden tak dapat dilepaskan dengan sejarah agraria di wilayah Kabupaten Klaten. Ketika tembakau untuk keperluan cerutu mulai ditanam di wilayah Kabupaten Klaten, sekitar tahun 1870, tanah-tanah di wilayah Klaten berada dalam kekuasaan kerajaan (Kasunanan Surakarta). Klaten yang merupakan daerah *mancanegara* (luar daerah) dijadikan daerah logistik bagi kerajaan. Semua petani yang mengolah tanah kerajaan berstatus petani penggarap. Mereka diwajibkan menyetorkan pajak dalam bentuk natura kepada kerajaan ditambah wajib kerja untuk kerajaan setahun tiga kali. Raja merupakan pemilik tanah yang resmi. Dalam kenyataan di lapangan, raja menyerahkan tanah-tanahnya kepada para birokrat kerajaan sebagai gaji atau imbal jasa. (Suhartono, 1991: 27-28). Tanah kerajaan yang

diserahkan kepada para birokrat kerajaan tersebut disebut tanah *lungguh* atau tanah *apanage*. Para punggawa kerajaan hanya berperan sebagai pemegang *lungguh* (*apanage holder*), dan tidak mempunyai hak milik. Tanah kerajaan yang dikuasakannya hanyalah semacam tunjangan jabatan.

Birokrat kerajaan sebagai pemegang *lungguh* menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada para petani melalui pejabat di tingkat desa untuk digarap, berdasarkan aturan saat itu. Hubungan antara petani dengan kepala desa (*bekel, lurah*) dan antara petani dengan penguasa tanah diwarnai oleh praktik patronase yang kental. Bekel atau lurah dan penguasa tanah adalah patron bagi petani. Petani menjadi klien di hadapan perangkat desa dan birokrat kerajaan.

Ketika sistem perkebunan masuk di wilayah Klaten, tanah-tanah kerajaan disewa oleh pengusaha perkebunan - yang umumnya orang Belanda - untuk ditanami tebu, tembakau, teh, indigo, coklat dan kopi. Pengusaha perkebunan menyewa tanah secara langsung dari para pemegang *lungguh* (birokrat kerajaan). Petani yang semula menggarap tanah kerajaan tetap diberi hak untuk menggarap sekaligus dijadikan buruh perkebunan. Tanah yang ada dibagi berdasarkan sistem blok. Ketika suatu blok ditanami tanaman perkebunan, blok lain yang ada di dekatnya dipersilahkan untuk digarap petani sebagai upah kerja. Dengan masuknya sistem perkebunan, patron petani bertambah. Pengusaha perkebunan dengan para pegawainya menjadi patron baru, selain perangkat desa.

Reorganisasi agraria yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1912 dan baru selesai tahun 1926 (Suhartono, 1991: 96) menghapus pemilikan tanah oleh raja sekaligus penguasaan tanah oleh birokrat kerajaan. Bekas tanah kerajaan diberikan kepada petani yang semula menggarap sebagai hak milik individual. Perusahaan perkebunan - termasuk perkebunan tembakau cerutu - harus berhubungan langsung dengan petani melalui perangkat desa bila hendak menyewa tanah untuk ditanami tanaman perkebunan.

Walaupun petani telah menjadi pemilik tanah, pola sewa-menyewa yang ada tetap menjadikan petani dalam posisi sebagai klien dari perusahaan perkebunan. Petani diprakondisikan selalu menjalin persahabatan dengan perusahaan perkebunan tembakau. Tetapi hubungan persahabatan itu berat sebelah. Perusahaan perkebunan tembakau mampu mendapatkan keuntungan yang besar dan berlimpah dari usahanya. Di sisi lain petani tidak ikut menikmati keuntungan besar yang diperoleh perusahaan perkebunan. Para buruh yang bekerja di

erkebunan juga selalu berada dalam posisi klien karena tidak memiliki posisi tawar dan segala sesuatunya hanya ditentukan pihak perusahaan. Petani dan buruh perkebunan dibuat memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan perkebunan.

Kondisi tersebut tidak hanya berlangsung di jaman penjajahan Belanda, melainkan juga berlangsung sampai sesudah kemerdekaan. Nasionalisasi perusahaan Belanda yang dilakukan tahun 1957 tak banyak mengubah praktik patronase di lingkungan perkebunan tembakau di Vorstenlanden di wilayah Klaten. Perusahaan negara (PT PN X) yang melanjutkan operasi gabungan perusahaan perkebunan tembakau cerutu di Klaten tidak banyak mengubah pola hubungan kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan petani dan antara perusahaan perkebunan dengan buruh. Akibatnya petani pemilik lahan dan buruh tetap berada dalam posisi sebagai klien dan perusahaan perkebunan tetap sebagai patron.

Dasar Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimanakah bentuk hubungan patron-klien di lingkungan perkebunan tembakau di Vorstenlanden Kabupaten Klaten saat ini?; (2) Mengapa hubungan patron-klien di lingkungan perkebunan tembakau di Vorstenlanden dan eksploitasi perkebunan terhadap petani tembakau dan buruh perkebunan masih terus berlangsung?; (3) Mengapa ketidaksetaraan hubungan antara petani tembakau dan buruh perkebunan dengan perusahaan perkebunan berlangsung lama?; dan (4) Bagaimana implikasi hubungan patron-klien di lingkungan perkebunan tembakau cerutu dengan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat wilayah Klaten?

Struktur Teori

Ikatan patron-klien merupakan kasus khusus dari hubungan di antara dua orang atau dua pihak) yang melibatkan persahabatan instrumental antara seorang individu atau pihak dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien). Pada gilirannya klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan, kepada patron (Scott, 1993: 7-8). Hubungan jenis ini disebut pula hubungan induk semang - klien'. Pada hubungan patron-klien, terjadi hubungan

timbal balik. Induk semang umumnya orang atau pihak yang berkuasa dalam masyarakat dan harus memberi perlindungan sebanyak mungkin kepada klien-kliennya. Sebaliknya para klien wajib membalas budi baik induk semang dan membelanya terhadap para pesaingnya. (Koentjaraningrat, 1990: 160-161).

Sebagai bentuk relasi antarmanusia dan antarkelompok manusia yang bersifat sosial-kultural, dalam kenyataan, praktik patronase tak terlepas dengan kepentingan ekonomi dan politik. Melalui perlindungan yang diberikan, patron berharap mendapatkan dukungan ekonomi dan politik secara langsung. Bila tidak mendapatkan apa-apa yang bersifat ekonomi dan politik, patron tak akan memberikan perlindungan. Oleh karena itu, Wolf (1985: 152-153) menekankan bahwa hubungan patron-klien bersifat vertikal antara seseorang/pihak yang mempunyai kedudukan sosial, politik dan ekonomi yang lebih tinggi dengan seseorang atau pihak yang kedudukan sosial, politik dan ekonominya lebih rendah. Ikatan yang tidak simetris tersebut merupakan bentuk persahabatan yang berat sebelah.

Dalam kenyataan praksis, hubungan patron-klien yang terlihat sebagai suatu fakta sosial-kultural, dan hanya didasarkan pada perjanjian informal (Levinson & Melvin Ember, 1996: 906), menjadi pembungkus yang halus dari hubungan sosial, politik dan ekonomi yang diwarnai ketidaksetaraan. Dalam hubungan yang diwarnai ketidaksetaraan, peluang untuk terjadinya eksploitasi menjadi sangat besar.

Guna memahami hubungan patron-klien di lingkungan masyarakat perkebunan tembakau di Vorstenlanden di Klaten, kecuali digunakan teori antropologi menyangkut praktik patronase, juga digunakan Teori Ketergantungan Klasik yang dikembangkan oleh Andre Gunder Frank. Teori ini lebih dikenal dengan dengan istilah Teori Pembangunan Keterbelakangan. Menurut teori ini, kapitalisme, baik yang global maupun yang nasional, adalah faktor yang telah menghasilkan keterbelakangan di masa lalu dan yang terus mengembangkan keterbelakangan di masa sekarang. (Arief Budiman, 2000: 64-65). Keterbelakangan bukanlah suatu kondisi alamiah dari sebuah masyarakat, bukan juga karena masyarakat itu kekurangan modal, melainkan karena proses ekonomi, politik dan sosial yang terjadi sebagai akibat dari globalisasi dari sistem kapitalisme.

Teori Pembangunan Keterbelakangan dipilih mengingat keberadaan perkebunan tembakau di Vorstenlanden di Klaten - dan juga di wilayah eks Karesidenan Besuki Jawa Timur dan di Deli Sumatera Utara - merupakan manifestasi dari kapitalisme internasional yang dibawa penjajah Belanda. (Soegijanto Padmo, 1991: 10). Sesudah dinasionalisasi,

usaha perkebunan tembakau cerutu di Klaten telah menjadi manifestasi kapitalisme nasional. Tetapi berhubung semua produksi dijual ke pasar internasional (ekspor), manifestasi kapitalisme global tetap terlokalisasi pada perkebunan tembakau Vorstenlanden.

Dalam memahami praktik patronase di lingkungan perkebunan tembakau cerutu Klaten menurut perspektif sosiologis tentang Ketahanan Sosial, digunakan pendekatan sosiologi yang membahas indikator kualitas hidup manusia yang bersifat sosial. Untuk keperluan itu dipakai indikator kualitas hidup versi GPID (*Goals, Processes and Indicators for Development*) dari Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan indikator kualitas hidup sosial versi GPID, perkebunan tembakau cerutu Klaten dilihat berdasarkan aspek-aspek: (1) kebebasan dari ketergantungan terhadap sistem global; (2) demokratisasi proses produksi; (3) peningkatan produktivitas tenaga kerja. (Nasikun, 1992: 72-73).

Objek Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan bentuk hubungan patron-klien di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden di Klaten; (2) melihat keberadaan praktik patronase di lingkungan perkebunan tembakau cerutu dalam kaitannya dengan hubungan yang diwarnai ketidaksetaraan antara petani-buruh perkebunan tembakau dengan perusahaan perkebunan tembakau Vorstenlanden; dan (3) mengetahui pengaruh hubungan patron-klien terhadap Ketahanan Sosial Ekonomi di Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi suatu fenomena sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti. (Sanapiah Faisal, 1999: 20). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran tentang suatu peristiwa atau keadaan secara obyektif dalam bentuk deskripsi situasi dan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: pengumpulan data, klasifikasi serta analisis atau pengolahan data. (Santjaningrat, 1981: 42). Melalui penelitian deskriptif dilakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. (Singarimbun, 1989: 4-5). Kecuali untuk menemukan *fact-finding*, penelitian deskriptif juga menghubungkan fakta

yang satu dengan fakta lain. Terhadap fakta-fakta yang ditemukan, dilakukan penafsiran yang adekuat. (Hadari Nawawi, 1998: 63).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian deskriptif-analitik dengan metode studi kasus digunakan untuk memahami secara cermat dan mendalam upaya pendeskripsian fenomena-fenomena dalam penelitian. Fenomena-fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seputar hubungan patron-klien di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden Klaten, khususnya hubungan antara petani, buruh dan perusahaan perkebunan. Dengan pemilihan metode studi kasus, penelaahan kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. (Sanapiah Faisal, 1999: 22).

Lokasi penelitian adalah wilayah Kabupaten Klaten, khususnya desa-desa yang wilayahnya ditanami tembakau cerutu dan desa-desa yang menjadi lokasi pabrik tembakau cerutu. Obyek dan sasaran kegiatan penelitian adalah masyarakat perkebunan tembakau Vorstenlanden di Klaten yang terdiri dari petani pemilik tanah, buruh pabrik dan buruh lahan dan pejabat-pejabat di lingkungan perusahaan perkebunan tembakau cerutu. Pelaku lain yang terdiri dari penjual makanan dan minuman untuk buruh dan tenaga transportasi juga dijadikan obyek dan sasaran penelitian. Data dari mereka merupakan data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari responden lain yang terdiri dari perangkat desa, pejabat di lingkungan Pemda Dati II Kabupaten Klaten dan pakar tembakau cerutu.

Sebagaimana disyaratkan dalam penelitian dengan menggunakan metode studi kasus, data dikumpulkan dari enam (6) sumber bukti, yakni dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta perangkat fisik (Yin, 1988: 85-104).

HASIL PENELITIAN

Temuan hasil penelitian memperlihatkan bahwa sampai saat ini hubungan patron-klien di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden Klaten masih ada. Praktik patronase yang berkembang dewasa ini sudah lebih halus dan dibungkus dalam perjanjian dan aturan yang formal. Pihak yang menjadi patron untuk saat ini adalah perusahaan perkebunan. Di lahan perkebunan tembakau, perusahaan perkebunan diwakili oleh mandor lapangan dan sinder. Demikian juga di pabrik, personifikasi patron adalah para mandor dan kepala bagian. Sedangkan pihak yang menjadi klien adalah petani dan buruh.

Bentuk perlindungan yang diberikan patron kepada klien petani adalah pemberian rasa aman dalam bentuk jaminan penghasilan yang

ti dan tiadanya kerugian yang harus ditanggung petani. Selain itu, ani juga diberi kesempatan untuk bekerja di lahan mereka yang disewa kebun untuk ditanami tembakau cerutu. Perlindungan lain kepada n sebagai kelompok terwujud dalam pemberian berbagai bantuan ada masyarakat, baik bantuan untuk menunjang pembangunan fisik a maupun bantuan insidental setiap peringatan Hari Kemerdekaan. apun bentuk perlindungan yang diberikan patron kepada klien buruh an dan buruh harian pabrik adalah pemberian jaminan untuk bekerja perusahaan perkebunan setiap kali musim tanam. Dengan hubungan eluargaan yang terjalin antara buruh dan mandor, oleh mandor buruh min diterima bekerja di lahan maupun di pabrik. Sebaliknya, petani nilik lahan yang hampir semua sudah lama menjalin kerjasama gan perusahaan perkebunan tembakau juga memberikan jaminan tertulis kepada perusahaan perkebunan bahwa lahan mereka setiap t dapat disewa oleh perusahaan perkebunan untuk ditanami bakau Vorstenlanden.

Petani tembakau mendukung secara penuh keberadaan perke- an tembakau cerutu di desa/wilayahnya, selain karena perusahaan mberikan jaminan pendapatan yang sudah pasti, juga karena usahaan perkebunan tembakau Vorstenlanden di Klaten sudah ukti memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam memajukan ekonomian di wilayah Klaten. Perkebunan tembakau cerutu tidak ya memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, melainkan juga ih menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk Klaten, ramaikan kegiatan perekonomian di daerah Klaten dan melahirkan bagai jenis pekerjaan di luar pertanian, seperti perdagangan makanan i minuman untuk buruh pabrik dan buruh lahan, perdagangan bambu uk keperluan penanaman tembakau dan jasa transportasi ngangkutan buruh ke lahan maupun transportasi tembakau saat en.

Petani sebagai pemilik lahan - dan lebih-lebih buruh - sampai saat belum memiliki kekuatan tawar yang besar di hadapan perusahaan kebun. Secara sosial, ekonomi dan politik, petani dan buruh merasa h lebih rendah dan lemah dibanding perusahaan perkebunan. nampuan perusahaan perkebunan dalam membeli tembakau yang asilkan oleh tanah petani dan memberikan uang *vorskot* sebelum bakau ditanam, memperlihatkan kedudukan ekonomi yang tinggi i perusahaan perkebunan.

Petani tembakau yang sudah memiliki forum untuk bersatu dan nyuarakan aspirasinya, yakni Forum Petani Tembakau Vorstenlanden ten, dalam memperjuangkan kepentingan petani baru sebatas

memperbaiki tingkat harga dan berbagai jenis uang yang diterima petani dalam kaitannya dengan sewa-menyewa lahan. Sejauh ini, berapapun tuntutan petani, dikabulkan oleh perusahaan perkebunan. Hal ini membuktikan bahwa posisi ekonomi perusahaan perkebunan sangat kuat.

Adanya kesenjangan yang tinggi dalam perolehan keuntungan antara perusahaan perkebunan dengan petani pemilik lahan - dan apalagi dengan buruh - tidak menjadikan petani enggan bekerjasama dengan perusahaan perkebunan tembakau. Bahkan sangat sedikit sekali petani yang berani memutuskan hubungan kerjasamanya (tidak melanjut- kan lagi kerjasama di musim tanam tembakau berikutnya) dengan perusahaan perkebunan, walaupun lahannya dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bila ditanami padi ataupun tanaman pangan lain. Petani pemilik lahan masih enggan untuk berspekulasi, sehingga lebih senang kalau lahan pertaniannya disewa oleh perusahaan perkebunan tembakau, karena tidak akan menderita kerugian sedikitpun. Keuntungan yang mereka peroleh memang tidak besar, tetapi hal itu lebih baik dibanding bila harus menanam lahannya sendiri. Bila lahannya ditanami sendiri, ada kemungkinan merugi. Petani tembakau cerutu di Klaten sudah tahu betul bahwa usaha tani yang dilakukannya bertahun- tahun selalu berpeluang besar merugi. Dengan tetap menjalin kerjasama dengan perusahaan perkebunan tembakau, petani juga ingin tetap menjaga harmoni yang ada di lingkungannya.

Hubungan patron-klien di lingkungan perkebunan tembakau di Klaten tidak mudah hilang, berhubung praktik patronase tersebut sudah berlangsung lama. Praktik patronase ini tidak terlepas dari sejarah agraria di wilayah Klaten yang diwarnai praktik patronase, dan juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-kultural petani di Indonesia yang sejak dahulu sampai sekarang masih diwarnai praktik patronase.

Dilihat berdasarkan konsep-konsep hubungan patron-klien yang dikembangkan Scott (1993), Koentjaraningrat (1990), David Levinson dan Melvin Ember (1996), serta Wolf (1985), maka hubungan yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan petani dan buruh di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden Klaten memenuhi kriteria untuk disebut hubungan yang diwarnai praktik patronase. Walaupun hubungan antara kedua belah pihak sudah diikat dalam perjanjian formal (untuk petani: kontrak) dan didasarkan pada aturan perundang- undangan yang berlaku (untuk buruh: berbagai peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan), namun dalam hubungan tersebut masih ditemukan pihak yang memberi perlindungan dan pihak yang memperoleh perlindungan, adanya ketidakseimbangan atau situasi berat sebelah

lam perolehan keuntungan ekonomi, pemilikan status sosial dan akses bidang politik. Ciri-ciri lainnya, hubungan antara kedua belah pihak bersifat sukarela, klien memberikan dukungan pada patron di bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan ditinjau berdasarkan indikator kualitas hidup sosial rsi GPID yang dikembangkan Universitas PBB, perkebunan tembakau Vorstenlanden di Klaten masih memperlihatkan kualitas hidup sosial yang rendah: (1) perusahaan perkebunan tersebut belum terbebas dari ketergantungan terhadap sistem global, (2) petani dan buruh tidak melibatkan dalam proses produksi (akses ke proses produksi melalui organisasi maupun lembaga perwakilan masih sangat terbatas dan sangat rendah), dan (3) produktivitas tenaga kerja juga masih rendah.

ESIMPULAN

Hubungan patron-klien di lingkungan perkebunan tembakau yang pernah berkembang dengan subur di masa kerajaan dan penjajahan Belanda ternyata sampai sekarang masih tetap ada, walaupun bentuknya semakin tersamar dan halus. Petani dan buruh masih tetap menjadi klien. Sementara posisi patron yang di masa lalu dipegang oleh birokrat kerajaan memegang *lungguh* dan perangkat desa (bekel, lurah) serta didukung oleh pemerintah lokal, sejak reorganisasi agraria tahun 1912 - 1926 yang memungkinkan petani penggarap menjadi petani pemilik tanah, posisi patron dipegang oleh perusahaan perkebunan melalui aparatnya. Sebelum kemerdekaan, perangkat desa masih berperan sebagai patron melalui perannya sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh petani untuk berhubungan langsung dengan perusahaan perkebunan. Tetapi sejak kemerdekaan, khususnya sejak diberlakukannya UU No. 13 Tahun 1948 tentang Penghapusan Konversi, desa tidak lagi berkewajiban menyerahkan lahan pertanian di wilayahnya kepada perusahaan perkebunan tembakau. Hal ini menjadikan perusahaan perkebunan satu-satunya patron bagi petani dan buruh. Dalam memperkuat posisinya sebagai patron, perusahaan perkebunan mendapat dukungan dari elit lokal dan birokrat di pemerintahan, baik kalangan legislatif maupun eksekutif.

Hubungan patron-klien di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden Klaten dan eksploitasi perusahaan perkebunan terhadap petani dan buruh masih terus berlangsung sampai sekarang, karena: (1) hubungan yang sesungguhnya tidak setara tersebut sudah berlangsung lama dan dianggap sesuatu yang biasa serta wajar; (2) pada umumnya petani kurang berani berspekulasi dalam melakukan usaha tani serta kurang memiliki wawasan dan ketrampilan memadai untuk menanami

lahannya dengan berbagai tanaman yang bernilai ekonomis tinggi; (3) pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan di bidang pertanian dan perkebunan tidak merasa perlu melakukan perubahan kebijakan secara mendasar, berhubung sistem yang berlaku dalam pengembangan tanaman tembakau cerutu sudah dianggap baik dan sistem tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ketidaksetaraan hubungan antara perusahaan perkebunan tembakau cerutu di Klaten dengan petani dan buruh berlangsung dalam kurun waktu lama akibat adanya kondisi atau hal-hal sebagai berikut: (1) petani cenderung apatis dan menerima nasib, sehingga tidak merasa perlu melakukan perubahan yang bersifat mendasar menyangkut nasibnya; (2) tidak sedikit pihak di luar petani dan buruh (seperti pemerintah daerah, pengusaha lokal, pemerintah desa) yang ikut diuntungkan dengan sistem yang ada, sehingga mereka tidak merasa perlu melakukan perubahan; (3) keberadaan perkebunan tembakau cerutu di Klaten merupakan bagian dari kapitalisme global yang memiliki ciri eksploitatif, sekaligus bagian dari kapitalisme nasional yang juga eksploitatif terhadap kekayaan daerah.

Praktik patronase yang masih berkembang di lingkungan perkebunan tembakau Vorstenlanden Klaten telah membawa implikasi tersendiri bagi Ketahanan Sosial Ekonomi Wilayah Kabupaten Klaten. Walaupun perusahaan perkebunan tembakau Vorstenlanden memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi negara, telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk Klaten serta mendinamiskan perekonomian daerah, namun berhubung keuntungan terbesar mengalir ke pusat dan lebih banyak dinikmati petinggi perusahaan negara, maka perkebunan tembakau cerutu di Klaten justru melemahkan Ketahanan Sosial Ekonomi Kabupaten Klaten.

Dikaitkan dengan kualitas hidup sosial masyarakat perkebunan tembakau Vorstenlanden yang masih rendah menurut versi GPID, perkebunan tembakau cerutu di Klaten dapat dikatakan kurang berhasil dalam meningkatkan Ketahanan Sosial Ekonomi Wilayah Kabupaten Klaten. Secara makro, perusahaan perkebunan telah menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk, mendinamiskan perekonomian daerah dan melahirkan jenis-jenis usaha baru. Tetapi di tingkat mikro, perusahaan perkebunan belum mendistribusikan keuntungan yang diperolehnya secara adil untuk petani, buruh dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Sanapiah. 1999. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartodirdjo, Sartono, dan Djoko Suryo. 1994. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Koentjaraningrat. 1981. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. 1990. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI Press.
- Levinson, David, dan Melvin Ember (ed). 1996. *Encyclopedia of Cultural Anthropology*. New York: A Henry Holt Reference, Book Henry Holt and Company.
- Nasikun. 1992. "Indeks Kualitas Hidup Fisik (PQLI): Makna dan Limitasi-limitasinya" dalam Sofian Effendi dkk., *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Padmo, Soegijanto. 1991. "Pengusahaan Tembakau Cerutu dan Dampaknya terhadap Masyarakat", dalam *Prisma* No. 4 Tahun XX, April 1991. Jakarta: LP3ES.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi (ed). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Suhartono. 1991. "Agroindustri dan Petani: Multi Pajak di Vorstenlanden 1850-1900", dalam *Prisma* No. 4 Tahun XX, April 1991. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1991. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wolf, Eric R. 1985. *Petani, Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: CV Rajawali.
- Yin, Robert K. 1988. *Case Study Research, Design and Methods*. Newbury Park London, New Delhi: Sage Publications.